
**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT, DAN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO)**

¹⁾Yasma Amila Hasanah, ²⁾Noer Sasongko, ³⁾Andy Dwi Bayu Bawono

Jurusan Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

yasma.amila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan-SKPD (PPK-SKPD) dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan-SKPD (Pembantu PPK-SKPD) fungsi akuntansi. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Akuntansi, Keuangan, Daerah

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik bertumbuh dengan sangat cepat, terlebih di Indonesia sendiri setelah masa reformasi berlangsung di negara ini. Perkembangan akuntansi sektor publik ini dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan pemerintah Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kebebasan tertentu kepada setiap daerah dalam melangsungkan kegiatan fiskalnya. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, maka dengan demikian diperlukan program atau sistem yang mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik, karena melalui hal-

hal tersebut, maka akan menyebabkan munculnya sebuah sistem yang akuntabel dan terpercaya sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah dapat bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai sistem pemerintahan dan cara pengelolaan sistem pemerintah yang baik (*good governance*) pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk terus menerus melaksanakan sebuah tindakan atau terobosan dalam hal akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan yang baik yang berada di jajaran pusat maupun daerah. Tata kelola keuangan daerah harus mencakup secara keseluruhan dari peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan, maupun kontrol terhadap kualitas sumber daya manusianya. (Yuliani dkk, 2010).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas setiap kepala daerah maupun

yang memiliki kewenangan dalam tata kelola pengelolaan keuangan daerah wajib untuk menyertakan pernyataan pertanggung jawaban terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh sebuah daerah, dimana laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (Darise dalam Lasoma, 2012). Setiap tahunnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan yang dalam hal ini, kewenangan pemeriksaan laporan keuangan daerah maupun pusat diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian BPK akan mengeluarkan sebuah opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. BPK dapat memberikan lima macam jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Tidak Wajar (TP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapat opini WTP sebanyak 3 kali berturut turut terhitung sejak tahun pelaporan 2015-2017 Informasi tersebut dapat dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015-2017. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam hasil audit BPK merupakan suatu topik yang menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas LKPD tersebut antara lain adalah pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih ditemui ketidakkonsistenan dengan penelitian yang lain seperti hasil penelitian Latifah (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah, sedangkan Yusrawati (2015), Pratama (2017), Hakim (2017) sama-sama menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti hasil penelitian dari Martiningsih dan Inapty (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating. Latifah (2015) dan Pahlevi (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemahaman akuntansi pernah diteliti oleh Nova (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Defitri (2016), Pahlevi dan Mardiana (2017) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran internal audit pernah diteliti oleh Nova (2015) dan Pratama (2017) yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Martiningsih dan Inapty (2016) menyatakan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada para responden di lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Teknik yang digunakan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) fungsi akuntansi yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing SKPD. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS 20.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji instrument yang dipakai. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item-item dalam variabel pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah valid karena nilai $\text{sig} < 0,05$ atau nilai r hitung (*pearson correlation*) $> r$ tabel (nilai r tabel dengan $n = 100$ adalah 0,244). Jadi semua item valid karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan r hitung $> 0,244$. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel yang digunakan, menurut kriteria dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7. Berikut hasil analisis data yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Hasil Analisis Data

Variabel	B	Std.Err or	T	Sign
Konstanta	3,857	4,077	0,946	0,0348
PA	0,201	0,076	2,626	0,011
PSAKD	0,182	0,080	2,262	0,027
PIA	0,211	0,100	2,113	0,039
PSAP	0,202	0,066	3,041	0,003
R			0,811	
R-Squared			0,658	
F-Hitung			28,817	
Sign F			0,000	

Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel pemahaman akuntansi (PA) adalah sebesar 0,011 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti secara parsial pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Proses penyusunan

laporan keuangan perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah bagaimana para karyawan atau staf yang mengerjakan laporan keuangan, paham bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2016), Pahlevi dan Mardiana

(2017) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (PSAKD) adalah sebesar 0,027 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem dan prosedur keuangan daerah yang sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang undangan dibutuhkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik dan handal. Mardiasmo dalam Permadi (2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa untuk memperoleh sebuah laporan keuangan yang berkualitas, andal, akuntabel, relevan, dan transparan, perlu untuk diciptakan sebuah standar akuntansi yang baik yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penggunaan untuk keperluan pembuatan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusrawati dan Andini (2015) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan level signifikansi variabel peran internal audit (PIA) adalah sebesar 0,039 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

secara parsial peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Untuk menentukan keandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, Inspektorat melakukan revidu terhadap laporan keuangannya. Proses revidu atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses revidu ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan laporan keuangan daerah itu sendiri. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015), Pratama (2017) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan level signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Azlim, dkk (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sebuah pemerintahan dalam proses akuntansi maupun pelaporan keuangannya, perlu untuk menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan dijadikan acuan oleh pemerintah untuk digunakan dalam setiap standar pelaporan akuntansi oleh lembaga-lembaga maupun instansi yang berada dibawah naungan pemerintah. Oleh sebab itu, penggunaan

standar akuntansi pemerintahan dalam setiap proses akuntansi pemerintah, perlu dilakukan agar tercipta sebuah laporan keuangan yang berkualitas, relevan, handal, dan baik di mata masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Martiningsih dan Inapty (2016) serta Latifah (2015) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan nilai *R square* sebesar 0,658 atau 65,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, penerapan standar akuntansi pemerintah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) sebesar 65,8%. Sedangkan 34,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwanis, dan Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala
- Defitri, Siska Yulia. 2016. *Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Jurnal Politeknik Negeri Padang
- Hakim, Abdul. 2017. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)*. Jurnal Fekon Vol 4 No 1
- Lasoma, Vicky Agustiawan. 2012. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
- Latifah, Asysyihatul. 2015. *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, system akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah*. Universitas PGRI Yogyakarta
- Martiningsih, Sri Pancawati dan Biana Adha Inapty. 2016. *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 9 Universitas Mataram NTB
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi Universitas Widyatama Bandung.
- Pahlevi, Heru dan Rizki Mardiana. 2017. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektifitas penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan*

-
- keuangan (Studi pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh).*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol 2 No 2
- Pratama, Andika. 2017. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan .*Jurnal STIE Perbanas Surabaya
- Republik Indonesia .*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*Pdf.
- Wati, Sri Nova. 2015. *Pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung).*Jurnal Universitas Negeri Padang
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Usman Bakar. 2010. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah Kota Banda Aceh).* Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Volume 3 Nomor 2.
- Yusrawati, Dewi Andini. 2015. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.* Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi I Vol 24